

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa

¹ <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diunduh 12 Mei 2015, pukul 21.00

pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Di samping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.²

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak.³

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. *Broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya

² http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitas_anak&&nomorurut_artikel=390, diunduh

12 Mei 2015, pukul 21.00

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hal.40.

hal-hal :⁴

1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia
2. Perceraian orang tua
3. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama

Keadaan yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering kali pula terjadi suatu gejala adanya *broken home semu (quasi broken home)* ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian kepada anak-anaknya.⁵

Setelah keluarga salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran adalah tempat anak bersosialisasi yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus di mana anak sebagai pelaku kejahatan ternyata memiliki keluarga yang harmonis, ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

⁴*Ibid.* hal.41

⁵ *Ibid*

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, di mana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif.

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan.⁶ Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Secara sosiologis, maka kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti, bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia. Dengan demikian, maka di dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk.⁷

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Oleh karena pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat

⁶ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 24.

⁷ Soerjono Soekonto, dkk, 2004, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.58.

relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.⁸

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut “penjahat”. Penjahat atau pelaku kejahatan ditinjau dari aspek yuridis merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran-pelanggarannya dan telah dijatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana.⁹

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah di mana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak. Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35

⁸ Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya : Srikandi, hal. 23.

⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, hal. 11.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Diambil dari sebuah contoh kejadian nyata, pada zaman sekarang nyatanya anak sudah berani melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah YD dan HANG dua orang anak di Kabupaten Klaten yang masing-masing masih berusia 16 tahun telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln adalah sebagai berikut : ¹⁰

“Bahwa mereka Terdakwa I. YD dan terdakwa II. HANG pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, di Dukuh Gesing, Desa Jatipuro, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ketempat di mana Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya, yaitu sepeda motor Suzuki Sky Drive warna hitam milik orang tua Terdakwa II namun sekarang sudah dijual, dan pada saat itulah para Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Noka : MH8BG41CAA373576 Nosin : G421ID433816 milik saksi SHD yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan tidak dikunci stang, sehingga timbul niat para Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara langsung menaikinya kemudian Terdakwa II mendorong menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Sky Drive menuju kerumah Terdakwa II.] “

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln

Salah satu contoh kenakalan yang dilakukan anak nyatanya terjadi zaman sekarang, dua anak tersebut merupakan salah satu contoh anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan terbukti bersalah di pengadilan, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana penjara untuk terdakwa I selama 3 (tiga) bulan, untuk terdakwa II selama 2 (dua) bulan. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa apabila anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke Sidang Anak. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan, dalam masalah anak penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan dalam sistem peradilan saja akan tetapi juga dikenal adanya *restorative justice*.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹ Jadi dalam konsep *restorative justice* ditekankan untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan prinsip kekeluargaan.

¹¹https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/consultations/restorative_justice/presentations/dyah_dewi/Diversi%20dalam%20SPPA%20Indonesia-rev.pdf, diunduh 13 Mei 2015, pukul 22.00

Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.¹²

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan

¹²<https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, diunduh 13 Mei 2015, pukul 22.10

berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal tertarik untuk membuat penulisan skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi kasus Putusan Pidana Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan anak?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak pada perkara Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak pada perkara Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan) apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran dari rakyat, terlepas dari apakah asas-asas hukum tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana.¹³ Jadi bisa dikatakan bahwa kejahatan itu merupakan suatu perbuatan yang relatif berdasarkan pandangan dari masyarakat itu sendiri.

Rechtdelictum adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang dan perbuatan tidak adil menurut asas-asas hukum yang tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang pidana. Tegasnya, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi masyarakat memandangnya sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum masyarakat yang bersangkutan, maka disitu merupakan *rechtdelictum* sebagai suatu kejahatan.¹⁴ Dari sekian banyak perbuatan yang merupakan delik hukum (kejahatan) salah satu contohnya yaitu

¹³ Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, hal. 55-56.

¹⁴ *Ibid*

tindak pidana pencurian.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta.”

Selain itu dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia juga dijelaskan bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini tentunya melibatkan seorang anak dan perlindungannya, yang di mana dalam pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Mengenai perlindungan anak itu sendiri, apabila seorang anak melakukan kejahatan maka sengketa anak tersebut tidak harus diselesaikan dengan pemidanaan saja, akan tetapi juga dengan menggunakan prinsip *restorative justice*. Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative”.

Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang keadilan masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, menurut pendapat komarudin : “Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.¹⁶ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji undang-undang yang terkait dengan tindak pidana dalam putusan Nomor:2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln, dalam hal ini Undang-

¹⁵Nashriana, *Op.Cit.*, hal.1.

¹⁶ Martin Steinman dan Gerald Willen, 1974, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung : Angkasa, hal. 97.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan cara dengan menguji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dalam putusan Nomor:2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln, yang menggunakan dasar hukum pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian dikaji dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghlm.ia Indonesia, hal. 160.

A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta.

2) Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi No. 17
Sukoharjo.

b. Penelitian Lapangan

1) Pengadilan Negeri Klaten Jl. Raya Klaten-Solo KM. 2 Klaten.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer menurut Amirudin dan Zainal Asikin adalah “data yang diperoleh langsung dari sumber pertama”.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari instansi atau lembaga terkait, yaitu di Pengadilan Negeri Klaten dan dari hasil wawancara dari pihak terkait. Pihak terkait dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Klaten.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁹ Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.hal.30.

¹⁹ *Ibid*

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku tentang hukum pidana dan hukum pidana anak, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

5. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi yang bersangkutan, maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap masalah hukum yang semata-mata ditujukan terhadap data kepustakaan atau dokumentasi, berarti hanya melakukan studi terhadap data sekunder (data tangan kedua atau tangan ketiga), dengan pendekatan masalah yang hanya

bersifat yuridis atau normatif.²⁰ Dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dititik beratkan pada penggunaan dan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

- b. Untuk mendukung data primer yang diperlukan, maka penulis akan mengumpulkan data lapangan yang tersedia di lingkungan instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Klaten, dan wawancara dengan pejabat dalam instansi yang terkait yaitu hakim di Pengadilan Negeri Klaten, demi kelengkapan data primer dalam skripsi ini. Kemudian hasilnya akan dianalisis bersama-sama dengan data sekunder, sehingga penulis akan mendapatkan gambaran secara jelas, guna membahas permasalahan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis *yuridis-kualitatif*, yaitu metode analisis data yang tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari lokasi yang luas dengan responden yang banyak, dengan keterangan jawaban yang banyak, tidak demikian, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.hal.22-23.

global (umum).²¹

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, penulis sebagai instrumen analisis akan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan. Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. Kepastian hukum, artinya apakah undang-undang sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum.

Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu,

²¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal.99.

sehingga akan mempermudah dalam melakukan pembahasan isi dari penelitian ini. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang hakim.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain: a) penerapan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln, b) dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak pada perkara Nomor : 2/PID.SUS-Anak/2014/PN.Kln.

Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.